

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan sajian data dan analisis yang telah peneliti uraikan pada BAB III, maka peneliti dapat menarik kesimpulan tentang manajemen isu Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam isu area bebas parkir kawasan Jeron Beteng, adalah Sebagai berikut :

1. Isu kontra kebijakan area bebas parkir kawasan Jeron Beteng muncul akibat diberlakukannya kebijakan area bebas parkir dikawasan Jeron Beteng yang menyebabkan beberapa kelompok pelaku wisata seperti Juru parkir, kelompok pedagang kaki lima, agen tour travel, wisatawan dan pemilik usaha yang berada dikawasan Jeron Beteng harus kehilangan mata pencarian serta mengalami penurunan pendapatan akibat menurunnya jumlah pengunjung wisata.
2. Tahapan-tahapan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam melakukan manajemen isu kebijakan area bebas parkir melalui beberapa tahapan manajemen isu antara lain, menganalisis isu-isu yang akan ditangani, merumuskan program kebijakan untuk merespon isu, pelaksanaan program dan evaluasi.
3. Dalam merumuskan program untuk merespon isu kebijakan area bebas parkir ini, Dinas Perhubungan melakukan beberapa cara yaitu dimulai dari

relokasi juru parkir ke tiga titik tempat parkir yang disediakan yaitu Ngabean, Senopati dan Abu bakar ali, mendirikan kios-kios pedagang untuk PKL, menyediakan *shuttle* angkutan *Thole* untuk lokasi parkir yang jauh dari tempat wisata.

4. Dinas Perhubungan tidak memiliki humas ataupun tim manajemen isu, sehingga manajemen isu dilakukan oleh bidang parkir serta bidang lalu lintas dan angkutan yang memiliki tugas dalam mengelola parkir maupun manajemen lalu lintas.
5. Faktor pendukung bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan manajemen isu adalah kerjasama dari beberapa instansi pemerintah terkait yang membantu dalam proses pelaksanaan program seperti Satpol PP yang membantu dalam proses penertiban, Dinas Perindagkom yang mengelola relokasi PKL dan Dinas Pariwisata yang membantu dalam menyebarkan informasi terkait kegiatan sosialisasi.
6. Faktor penghambat bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan isu adalah protes dari kelompok pelaku wisata yang terkena dampak ekonomi akibat diberlakukannya kebijakan area bebas parkir di kawasan Jeron Beteng.

## **B. Saran**

Dengan melihat bagaimana manajemen isu yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam mengelola isu kebijakan area bebas parkir kawasan Jeron

Beteng, maka peneliti dapat memberikan saran atas hasil penelitian yang telah diperoleh dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi atau pertimbangan serta evaluasi. Saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan perlu membuat kegiatan atau forum diskusi rutin bersama komunitas-komunitas pelaku wisata, untuk menjalin relasi dengan komunitas-komunitas tersebut dan mempermudah Dinas Perhubungan dalam memberikan informasi, menarik empati dan memberikan pemahaman kepada publiknya.
2. Dinas Perhubungan perlu melakukan riset sebelum memberlakukan kebijakan maupun setelah melaksanakan program dalam proses evaluasi, sehingga bisa mengidentifikasi isu-isu yang kemungkinan akan terjadi serta menetapkan strategi penanganan isu secara dini sehingga tidak menyebar secara luas.
3. Dinas Perhubungan menyediakan wadah aspirasi untuk masyarakat terkait kebijakan yang diberlakukan sehingga upaya respon cepat juga dapat diberikan jika terjadi permasalahan. Seperti kotak layanan aspirasi masyarakat dll
4. Dinas Perhubungan seharusnya mendirikan media center atau pusat layanan informasi terkait isu yang terjadi, untuk meminimalisir pemberitaan negatif dan menciptakan pengertian publik.

5. Dinas Perhubungan dapat membentuk tim manajemen isu khusus ataupun merekrut humas dari luar organisasi dalam menangani isu, sehingga ada bagian ataupun orang yang lebih ahli dalam handle publik.
6. Jika terjadi isu, Dinas Perhubungan perlu melakukan monitoring berita di media massa dengan cara mengkliping Koran maupun catatan, arsip, hal ini mempermudah Dinas Perhubungan dalam memantau perkembangan isu yang beredar diluar organisasi.
7. Melakukan penertiban terhadap parkir liar, masih banyak oknum juru parkir yang membuka parkir liar kendaraan, hal ini membuat program relokasi tentu tidak berjalan maksimal.